

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) Sebagai Upaya Digitalisasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

Ananda Vivi Aristania¹, Oktarizka Reviandani²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: anandaaristania@gmail.com¹, oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id²

Article History:

Received: 18 Januari 2026

Revised: 14 Januari 2026

Accepted: 03 Februari 2026

Keywords: E-SIMBADA, Digitalisasi, Barang Milik Daerah, Badan Pendapatan Daerah

Abstract: Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan e-SIMBADA sebagai upaya digitalisasi pengelolaan BMD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri serta mengkaji manfaat dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-SIMBADA mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam penatausahaan barang milik daerah. Seluruh data aset terintegrasi secara elektronik sehingga mempermudah proses administrasi dan pengawasan. Namun demikian, masih ditemukan kendala teknis seperti permasalahan kode register barang dan keterbatasan jaringan internet. Secara keseluruhan, penerapan e-SIMBADA dinilai penting dan strategis dalam mendukung digitalisasi pengelolaan barang milik daerah serta meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Bapenda Kabupaten Kediri.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar bagi instansi pemerintah. Sehingga Pemerintah melakukan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip *Good Governance* (Putra et al., 2022). Menurut Indrajit (2002), pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik merupakan kebutuhan strategis untuk menciptakan pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, banyak instansi pemerintah yang mulai menerapkan sistem digital. Menurut Heeks (2006) teknologi informasi berperan strategis sebagai fondasi *e-government* yang tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran sektor publik. Karena kelangsungan hidup instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh penerapan teknologi informasi yang akan membantu

menghadapi pesatnya arus pertumbuhan ekonomi global (Romandhon et al., 2022). Digitalisasi meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi dalam menjalankan proses administrasi dan proses pengelolaan data, termasuk dalam proses pengelolaan Barang milik daerah (BMD). Menurut (Zein & Septiani, 2024) di era globalisasi seperti saat ini, digitalisasi telah menjadi kunci untuk memodernisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Barang milik daerah (BMD) dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 2020) Pasal 1 Ayat (2) ialah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. BMD mencakup seluruh aset yang dimiliki pemerintah, termasuk gedung, kendaraan, peralatan, dan barang-barang yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik. BMD harus dikelola dengan baik, karena menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensinya (Devita & Aslami, 2022). Pengelolaan ini harus mengikuti ketentuan regulasi seperti (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2024), yang menuntut adanya sistem administrasi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Barang Milik Daerah (BMD), salah satu aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA). Digitalisasi dan integrasi data aset BMD memungkinkan peningkatan pengawasan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif (Fazri & Yulianti, 2025). Penerapan e-SIMBADA terlaksana di berbagai instansi pemerintah Kabupaten Kediri, termasuk di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. E-SIMBADA merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pencatatan, penatausahaan, inventarisasi, hingga pelaporan aset daerah secara terintegrasi. Validitas aplikasi ini juga didukung oleh adanya pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala (Tamelab et al., 2021). Aplikasi ini meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan aset, sekaligus memudahkan pengawasan dan pengendalian aset daerah. Dengan pengelolaan BMD secara optimal, akan berperan dalam menjaga ketersediaan aset daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Simatupang et al., 2023).

Sebelum adanya digitalisasi, pengelolaan BMD dilakukan secara manual yang menyebabkan banyak masalah, seperti data aset yang tidak sesuai, laporan yang disusun terlalu lama, informasi yang tidak akurat, dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan barang. Kondisi ini dapat menghambat upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penerapan e-SIMBADA diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses pelaporan barang daerah. Dengan adanya e-SIMBADA, proses penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Bapenda Kabupaten Kediri dapat dilakukan secara lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Digitalisasi pengelolaan barang milik daerah melalui e-SIMBADA merupakan implementasi *e-government* di tingkat pemerintah daerah. Selain faktor teknologi, keberhasilan implementasi sistem ini juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, dukungan organisasi, dan kesesuaian prosedur kerja yang diterapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang cara penerapan e-SIMBADA di Bapenda Kabupaten Kediri serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang penerapan e-SIMBADA di Bapenda Kabupaten Kediri dan mengevaluasi seberapa efektif sistem tersebut dalam mempercepat digitalisasi manajemen barang milik daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak positif implementasi sistem terhadap akurasi inventarisasi barang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sulistiyo (2023), penelitian kualitatif adalah metode yang hasilnya tidak diperoleh dari prosedur statistik, oleh karena itu, proses pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Metode penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti apa arti dari fenomena tersebut (Safrudin et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai proses, interaksi, dan pengalaman subjek penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh dan kontekstual. Dengan menitikberatkan pada makna, penelitian kualitatif tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana suatu fenomena berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) sebagai upaya digitalisasi pengelolaan barang milik daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Penelitian dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pada pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan barang daerah dan penggunaan e-SIMBADA. Serta observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan barang milik daerah menggunakan sistem tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri mulai diimplementasikan sejak tahun 2023. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh pada proses digitalisasi pengelolaan barang milik daerah. Teknologi informasi dalam e-SIMBADA memungkinkan integrasi data antarunit kerja, sehingga proses koordinasi dan pengawasan barang milik daerah dapat dilakukan secara lebih optimal. Salah satu komponen yang memengaruhi kompleksitas organisasi sektor publik adalah teknologi informasi (Aldino & Septiano, 2021). Dengan kemajuan teknologi informasi, mendorong sumber daya manusia untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya di bidang teknologi (Suprianto, 2023). Perkembangan ini menuntut individu agar mampu beradaptasi dengan berbagai inovasi digital yang digunakan dalam proses kerja, khususnya di lingkungan organisasi dan instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam menciptakan tata kelola pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan sistematis.

Hal yang melatarbelakangi pembentukan e-SIMBADA adalah kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan barang milik daerah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Sebelum adanya e-SIMBADA, proses manajemen barang daerah meliputi pencatatan, pengelompokan, dan pengadministrasian masih menggunakan dokumen fisik dan pencatatan konvensional. Pencatatan manual dalam proses pengelolaan barang milik daerah membuat pengguna barang sulit untuk melacak riwayat perubahan dan menemukan duplikat data dengan cepat (Surbakti et al., 2025). Sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama, kurang efisien, serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data antara catatan administrasi dan kondisi barang di lapangan. Sekarang, semua data barang milik daerah sudah terintegrasi dalam e-SIMBADA dan dapat diakses secara real time oleh pengelola barang (Permana, 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan e-SIMBADA di Bapenda Kabupaten Kediri membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan hasil wawancara, e-SIMBADA digunakan sebagai sistem yang mendukung proses administrasi dan penatausahaan barang daerah. Penerapan sistem ini memungkinkan pegawai untuk melakukan penginputan, pemutakhiran, dan pengelolaan data barang secara terintegrasi

dalam satu sistem elektronik. Temuan ini sejalan dengan model kesuksesan sistem informasi yang dikemukakan oleh DeLone & McLean (2003), yang menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan sistem serta manfaat bersih yang dirasakan oleh organisasi. Dengan demikian, proses kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa e-SIMBADA telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang lebih modern.

Peran e-SIMBADA dalam mendukung proses digitalisasi pengelolaan barang milik daerah di Bapenda Kabupaten Kediri dinilai sangat strategis. Berdasarkan keterangan pengelola barang, penggunaan e-SIMBADA sangat memudahkan pekerjaan pegawai, khususnya dalam hal administrasi dan pengelolaan data barang. Sistem ini mampu memperingkas tahapan kerja yang sebelumnya membutuhkan proses panjang, seperti pencatatan ulang dan pengecekan data secara manual. Melalui e-SIMBADA, data barang milik daerah dapat diakses dan dikelola secara elektronik, sehingga mempercepat proses administrasi serta meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Digitalisasi melalui e-SIMBADA juga mendorong terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang lebih tertib dan berbasis teknologi informasi.

Manfaat penerapan e-SIMBADA dirasakan secara luas oleh pegawai yang memiliki akses terhadap sistem tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai yang diberikan hak akses dapat melihat dan mengetahui data barang milik daerah yang tercatat dalam sistem. Kondisi ini menciptakan proses administrasi yang lebih transparan, karena informasi terkait barang milik daerah dapat diakses oleh pegawai terkait tanpa harus bergantung pada satu pihak tertentu. Transparansi data ini juga memudahkan koordinasi antarbagian dalam pengelolaan barang milik daerah, serta membantu pegawai dalam memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi barang yang ada. Dengan demikian, e-SIMBADA berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah di Bapenda Kabupaten Kediri.

Meskipun penerapan Sistem Informasi e-SIMBADA memberikan berbagai manfaat dalam mendukung digitalisasi pengelolaan barang milik daerah, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah permasalahan teknis yang berkaitan dengan kode register barang, khususnya pada barang-barang yang memiliki jenis, fungsi, dan spesifikasi yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola barang, diketahui bahwa dalam sistem e-SIMBADA terdapat sejumlah barang sejenis yang tercatat menggunakan kode register yang sama, sehingga menyulitkan proses identifikasi masing-masing barang secara rinci.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi proses pemindahtanganan atau mutasi barang. Dalam kondisi tersebut, sistem e-SIMBADA secara otomatis menghapus data kode register barang lain yang sejenis dan memindahkannya ke aset di lokasi tujuan pemindahan, meskipun secara fisik masih terdapat barang lain dengan spesifikasi yang sama di lokasi awal. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Van Meter & Van Horn (1975), yang menyatakan bahwa kendala teknis dan keterbatasan sistem sering menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan berbasis teknologi di sektor publik. Akibatnya, data yang tercatat dalam sistem menjadi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi barang yang sebenarnya di lapangan. Ketidakesesuaian data ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pengelola barang dalam melakukan penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan aset daerah, terutama ketika dilakukan pemeriksaan barang milik daerah.

Selain itu, permasalahan kode register yang sama juga dapat memengaruhi akurasi data inventaris dan memperbesar risiko kesalahan administrasi apabila tidak segera ditangani dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun e-SIMBADA telah mampu meningkatkan

efisiensi dan keteraturan pengelolaan barang milik daerah, masih diperlukan penyempurnaan pada aspek teknis sistem, khususnya dalam pengelolaan kode register barang, agar data aset daerah dapat dikelola secara lebih akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain permasalahan kode register, kendala lain yang dihadapi dalam penerapan e-SIMBADA adalah keterbatasan kualitas jaringan internet. Hal ini didukung dengan temuan Heeks (2006), yang menekankan bahwa keberhasilan sistem informasi pemerintah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan dukungan teknis yang memadai. Jaringan yang belum sepenuhnya stabil menyebabkan proses penginputan dan pengelolaan data menjadi terhambat pada waktu-waktu tertentu. Gangguan jaringan ini berdampak pada keterlambatan pembaruan data dan mengurangi optimalisasi pemanfaatan sistem e-SIMBADA dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Keterbatasan jaringan juga mengurangi efektivitas pemanfaatan e-SIMBADA sebagai sistem informasi terintegrasi, karena pegawai tidak selalu dapat mengakses sistem secara lancar ketika dibutuhkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran proses penatausahaan barang milik daerah serta menghambat optimalisasi digitalisasi administrasi yang diharapkan melalui penerapan e-SIMBADA dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Bapenda Kabupaten Kediri telah melakukan sejumlah upaya penyesuaian dan solusi praktis. Dalam menyikapi permasalahan kode register barang, pegawai melakukan penyusunan data secara manual dengan menambahkan akhiran nomor pada akhir kode register barang, sebagai penanda pembeda antarbarang yang sejenis. Penyesuaian ini dilakukan sebagai solusi internal agar pegawai tetap dapat mengidentifikasi barang yang telah dipindahtangankan maupun barang yang masih berada di Bapenda. Meskipun penyesuaian tersebut tidak mengubah data utama dalam sistem, informasi tambahan ini dapat digunakan sebagai bahan penjelasan apabila dilakukan pengecekan atau audit barang milik daerah.

Sementara itu, untuk mengatasi kendala jaringan internet, Bapenda Kabupaten Kediri melakukan koordinasi secara bertahap. Langkah awal yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada bagian server internal untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal terhadap permasalahan jaringan. Apabila permasalahan belum dapat diselesaikan, maka dilakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan infrastruktur jaringan. Upaya ini dilakukan agar sistem e-SIMBADA tetap dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak menghambat proses administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Implementasi sistem ini juga membutuhkan persiapan struktural dan budaya kerja yang mendukung integritas dan keterbukaan (Maulidia & Lutfia, 2025). Persiapan struktural tersebut meliputi penyesuaian alur kerja, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan kebijakan internal agar sistem dapat digunakan secara konsisten oleh seluruh pegawai terkait. Selain itu, budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi perlu dibangun agar pegawai memiliki komitmen dalam memanfaatkan sistem secara optimal. Dengan dukungan struktur organisasi dan budaya kerja yang kondusif, penerapan sistem informasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-SIMBADA di Bapenda Kabupaten Kediri telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung digitalisasi pengelolaan barang milik daerah. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif, berbagai upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Kediri menunjukkan adanya komitmen untuk terus menyempurnakan penerapan e-SIMBADA demi mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya komitmen tersebut, penerapan e-SIMBADA diharapkan dapat terus dikembangkan dan dioptimalkan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

perbaikan infrastruktur teknologi, serta penyesuaian prosedur kerja yang lebih adaptif terhadap sistem digital. Dengan demikian, penguatan penerapan e-SIMBADA tidak hanya berkontribusi pada tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Bapenda Kabupaten Kediri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan barang milik daerah. Implementasi e-SIMBADA sejak tahun 2023 mampu mengubah proses pengelolaan BMD yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital, sehingga lebih tertib, sistematis, dan terintegrasi. Sistem ini mempermudah pegawai dalam melakukan pencatatan, pemutakhiran data, serta pelaporan aset daerah secara lebih cepat dan akurat.

Penerapan e-SIMBADA juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah karena data dapat diakses oleh pegawai yang berwenang dan mendukung proses pengawasan internal. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala, seperti permasalahan kode register barang sejenis dan keterbatasan kualitas jaringan internet. Berbagai upaya penyesuaian dan koordinasi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Kediri menunjukkan adanya komitmen untuk terus menyempurnakan penerapan e-SIMBADA. Dengan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur, serta budaya kerja yang adaptif, e-SIMBADA diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung digitalisasi pengelolaan barang milik daerah di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Aldino, H. P., & Septiano, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/10.31869/me.v7i2.2865>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Devita, M., & Aslami, N. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu. *JOSR: Journal of Social Research*, 1(11), 144–149.
- Fazri, M. H. H., & Yulianti, L. (2025). Analisis Dampak Aplikasi Teknologi Siklus Barang Daerah dalam Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Kecamatan Selaawi). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 340–349.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. SAGE Publications.
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi.
- Maulidia, & Lutfia, C. (2025). Implementasi SIMBADA Melalui Program MBKM Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Aset di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pengabdian Inovasi Dan Teknologi Kepada Masyarakat*, 5(2), 415–423.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pub. L. No. 7 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024>
-

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pub. L. No. 28 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>
- Permana, D. (2025). Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Aset Daerah Yang Efektif Dan Efisien. *Journal Public Policy Services and Governance*, 1(2), 19–26.
- Putra, I. H., Ismanto, S. U., & Runiawati, N. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda Bmd) Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 238–255.
- Romandhon, R., Setiyadi, D., & Efendi, B. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 5(1), 107–119. <https://doi.org/10.32500/jematech.v5i1.2149>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Simatupang, J., Mustafa, B., & Widodo, A. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021. *Journal of Accounting Knowledge*, 1(1), 87–110.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Salim Media Indonesia.
- Suprianto, B. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 123–128. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015>
- Surbakti, E. S. J., Sembiring, Y., Ardiansyah, & Nalien, E. M. (2025). Pengelolaan Aset Melalui Simbada Di Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Mutiara Manajemen*, 10(1), 1–8.
- Tamelab, Y., Pala, A., Lassa, A., & Tiza, A. L. (2021). Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Aset Dan Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara. *Innovative*, 1(2), 663–672.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Zein, H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah*. PT Sada Kurnia Pustaka.
-